



PANGGILAN KRISTEN DALAM POLITIK: MELAYANI DENGAN INTEGRITAS DAN KASIH

Nikarni Zai^{1*}, Junidar Gulo²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta^{1,2}

ARTICLE INFO

Email koresponden:
zaykarny21@gmail.com

Keywords:
Integrity; Love;
Politics; Christian

Kata Kunci:
Integritas; Kasih;
Politik; Kristen

Waktu proses:
Submit: Desember 2024
Terima: Desember 2024
Publish: Januari 2025

Doi:
10.63536/imitatiochristo.v1i1.4



Abstract

This article explores the Christian calling in politics as a response to ethical challenges in modern political practices. The study focuses on the importance of Christian values, such as integrity and love, in transforming politics often dominated by self-interest and pragmatism. This research employs a qualitative method based on library research with a descriptive-analytical approach, examining theological literature, political philosophy, and biblical case studies to understand the principles of integrity and love in Christian political engagement. The research aims to offer a theological and practical framework for Christians to serve through politics, particularly within pluralistic societies and the challenges of globalization. The novelty of this research lies in its holistic approach, integrating theological reflection with practical steps to establish public policies rooted in love and justice. The findings demonstrate that politics, when conducted with principles of integrity and love, can serve as an effective means of social transformation. This article emphasizes that Christian involvement in politics is a divine calling reflecting the values of God's Kingdom.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi panggilan Kristen dalam politik sebagai respons terhadap tantangan etis dalam praktik politik modern. Latar belakang penelitian berfokus pada pentingnya nilai-nilai Kristen, seperti integritas dan kasih, untuk mentransformasi politik yang sering kali didominasi oleh kepentingan pribadi dan pragmatisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis riset pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur teologi, filsafat politik, serta studi kasus Alkitab untuk memahami prinsip integritas dan kasih dalam keterlibatan politik Kristen. Riset ini bertujuan menawarkan kerangka teologis dan aplikatif bagi umat Kristen dalam melayani melalui politik, khususnya di tengah masyarakat pluralistik dan tantangan globalisasi. Kebaruan research terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan refleksi teologis dengan langkah-langkah praktis untuk membangun kebijakan publik berbasis kasih dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik, ketika dilakukan dengan prinsip integritas dan kasih, dapat menjadi sarana transformasi sosial yang efektif. Artikel ini menegaskan bahwa keterlibatan Kristen dalam politik adalah panggilan ilahi yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, politik memegang peranan strategis dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Politik, dalam esensinya, adalah seni mengelola kekuasaan demi kepentingan masyarakat luas.¹ Namun, praktik politik sering kali diwarnai oleh kepentingan pribadi, korupsi, dan konflik kepentingan, sehingga menimbulkan tantangan etis yang signifikan.² Dalam kondisi seperti ini, peran orang Kristen menjadi sangat relevan untuk membawa nilai-nilai iman ke dalam dunia politik sebagai bentuk panggilan dan tanggung jawab moral. Kekristenan memandang politik sebagai salah satu arena pelayanan yang dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kasih Allah dan keadilan di tengah masyarakat.³ Melalui politik, umat Kristen memiliki kesempatan untuk menjadi garam dan terang dunia sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus (lht. Mat. 5:13-16). Panggilan ini mengacu pada keterlibatan aktif yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada transformasi kehidupan masyarakat menuju nilai-nilai Kerajaan Allah, yaitu keadilan, damai sejahtera, dan kasih.

Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa keterlibatan Kristen dalam politik tidak selalu bebas dari kritik. Beberapa kelompok Kristen di masa lalu terjebak dalam praktik politik yang cenderung pragmatis dan oportunistik. Hal ini menimbulkan dilema antara idealisme iman dan realitas politik yang sering kali kompleks dan kompromistis. Sehingga, penting untuk memahami kembali panggilan Kristen dalam politik, bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang didasarkan pada integritas dan kasih.⁴ Secara teologis, keterlibatan Kristen dalam politik dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip Alkitab, seperti mandat budaya yang diberikan kepada manusia dalam Kejadian 1:28, yakni memelihara dan mengelola bumi. Mandat ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia berpartisipasi dalam pengelolaan dunia, termasuk dalam bidang politik. Selain itu, nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, seperti Musa dan Daniel, memberikan contoh bagaimana iman dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan.⁵

¹ Robert P. Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi & Pusat Studi Etika, 2006). 7-8

² Dominikus Jawa et al., "Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 5-17.

³ Saut H. Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000). 232

⁴ Jonathan S. E. Ngesthi et al., "Membumikan Nilai dan Etika Politik Kristen dalam Teologi Titus 3:1-7 bagi Politikus Kristen Masa Kini," *Immanuel* 5, no. 2 (2024): 156-74.

⁵ Yohanes T. A. Indratno et al., "Berpolitik: Pandangan Alkitab tentang Politik dan Bagaimana Orang Kristen Bersikap terhadap Politik," *Lampo* 1, no. 1 (2024): 16-25.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus memberikan teladan yang unik dalam memahami hubungan antara iman dan otoritas duniawi. Ketika menghadapi pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar, Yesus menjelaskan bahwa ada ruang untuk memberikan penghormatan kepada otoritas duniawi tanpa mengkompromikan kesetiaan kepada Allah (bnd. Mat. 22:21).⁶ Hal ini menunjukkan bahwa politik, meskipun bersifat duniawi, tetap dapat digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kehendak Allah jika dilakukan dengan prinsip-prinsip yang benar. Di era modern, panggilan Kristen dalam politik menghadapi tantangan baru yang kompleks, seperti pluralisme agama, globalisasi, dan arus populisme.⁷ Realitas ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip iman dapat diterapkan dalam situasi yang sering kali ambigu. Dalam konteks ini, melayani dengan integritas berarti menjaga komitmen kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan melayani dengan kasih berarti mewujudkan kebijakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok marginal.

Integritas menjadi landasan utama bagi orang Kristen yang terjun ke dunia politik. Dalam perspektif Kristen, integritas bukan sekadar kejujuran secara personal, melainkan mencerminkan keselarasan antara iman dan tindakan.⁸ Seorang politisi Kristen yang berintegritas tidak hanya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, tetapi juga menjadi saksi Kristus melalui perilakunya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, integritas merupakan aspek kunci dalam mewujudkan panggilan Kristen dalam politik. Selain integritas, kasih merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari panggilan Kristen dalam politik. Kasih, sebagaimana diajarkan dalam 1 Korintus 13:4-7, adalah kasih yang sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan senantiasa berusaha untuk membawa kebaikan bagi orang lain.⁹ Dalam dunia politik, kasih terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pengambilan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Djoys A. Rantung dalam risetnya, mengkaji peran pendidikan Kristen dalam membangun kesadaran politik yang didasarkan pada nilai-nilai iman Kristen di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Dalam konteks ini, Rantung menjelaskan bahwa pendidikan Kristen memiliki peran signifikan dalam membentuk komunitas iman untuk terlibat dalam proses politik dengan menekankan pentingnya keadilan, kasih, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyoroti hubungan antara esensi politik dan koinonia, di mana nilai-nilai persekutuan komunitas gerejawi dapat

⁶ Suryowati, *Agresivitas Pajak dan Alternatifnya: Dari Sudut Pandang Matius 22:15-22* (Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022). 11

⁷ Yanuar A. Zega and Riste T. Silaen, "Pembimbingan Jemaat di GKSI Isa Almasih Taman Mini dalam Menolak Politik Uang," *Real Coster* 7, no. 2 (2024): 70-85.

⁸ Samuel L. Topayung, "Urgensi Kepemimpinan Kristen di Era Society 5.0," *KINAA* 3, no. 2 (2023): 111-24.

⁹ Denni K. J. Br Nainggolan et al., "Kreativitas Guru PAK Mengajak Siswa Hidup dalam Kasih Menurut 1 Korintus 13:4-7," *Visio Dei* 4, no. 1 (2022): 20-36.

menjadi kontribusi positif dalam kehidupan politik.¹⁰ Dalam penelitian Yohanes K. Susanta, menyoroti keterlibatan orang Kristen dalam politik sebagai bentuk pengabdian yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kasih dan keadilan. Susanta melalui tafsir naratif terhadap kisah Salomo dan Adonia menunjukkan bahwa politik sebaiknya tidak dipandang sebagai instrumen kekuasaan semata, tetapi sebagai sarana mewujudkan kehendak Allah dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan etika politik yang bersandar pada prinsip-prinsip iman Kristen, sekaligus menolak praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara demi ambisi pribadi.¹¹

Menilik dari riset terdahulu di atas, maka penelitian ini akan menawarkan konsep terbaru yang belum dikaji sebelumnya. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Kristen, khususnya prinsip integritas dan kasih, ke dalam praktik politik kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas politik sebagai medan perjuangan moral secara teoretis, penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip teologis tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam konteks politik yang sering kali sarat intrik dan kepentingan pribadi. Dengan menekankan pelayanan politik berbasis kasih dan keadilan, penelitian ini menawarkan paradigma baru bahwa politik, ketika dikelola dengan nilai-nilai Kristen, dapat menjadi sarana transformasi sosial yang efektif. Selain itu, penelitian ini memadukan analisis teologis dengan studi kasus modern untuk menjawab tantangan politik di era pluralisme dan globalisasi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakrawala teoretis tetapi memberikan panduan praktis bagi umat Kristen yang ingin terlibat aktif dalam politik tanpa kehilangan identitas imannya.

Karakteristik utama kebaruan penelitian ini adalah pendekatan holistik yang menggabungkan refleksi teologis dengan langkah-langkah aplikatif dalam ranah politik. Keunggulannya terletak pada penekanan simultan terhadap nilai integritas dan kasih sebagai fondasi pelayanan politik, yang sebelumnya jarang dibahas secara terfokus. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan dalam literatur teologi politik Kristen dengan memberikan kerangka kerja yang relevan untuk diterapkan di tengah konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk dan dinamis. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun pemahaman baru tentang panggilan Kristen dalam politik, sekaligus memotivasi umat Kristen untuk terlibat aktif dengan pendekatan yang penuh kasih dan berintegritas. Secara kontribusi, penelitian ini memberikan landasan konseptual dan panduan praktis yang dapat digunakan oleh pemimpin Kristen, akademisi, dan praktisi politik untuk menciptakan pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan.

¹⁰ Djoys A. Rantung, "Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk di Indonesia," *Shanan* 1, no. 2 (2017): 58-73.

¹¹ Yohanes K. Susanta, "Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta," *Dunamis* 4, no. 1 (2019): 22-36.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis riset pustaka, dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji dan memahami panggilan Kristen dalam politik melalui integritas dan kasih. Data penelitian dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap sumber-sumber literatur teologi, filsafat politik, dan studi kasus historis yang relevan.¹² Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis prinsip-prinsip Alkitab, seperti integritas dan kasih, dalam konteks keterlibatan politik kontemporer. Selain itu, penelitian ini membandingkan perspektif teologis dengan teori politik modern untuk membangun kerangka konseptual yang dapat menjembatani nilai-nilai Kristen dengan dinamika politik di era globalisasi. Pendekatan ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual yang praktis bagi keterlibatan Kristen dalam politik secara etis dan efektif.¹³

HASIL

Berdasarkan penelitian pada artikel ini, terdapat dua temuan utama yang signifikan, yakni; pertama, pentingnya integritas sebagai landasan keterlibatan politik Kristen. Integritas, dalam perspektif Kristen, mencerminkan keselarasan antara iman dan tindakan. Penelitian ini menyoroti bahwa integritas bukan hanya sikap personal tetapi juga komitmen terhadap nilai-nilai Alkitab dalam pengambilan keputusan politik. Dengan mempraktikkan integritas, pemimpin Kristen dapat menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan menghindari godaan korupsi serta nepotisme. Kedua, kasih sebagai prinsip pelayanan politik menjadi kekuatan transformasi dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan memperhatikan kelompok marginal. Kasih diwujudkan melalui keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam konteks politik pluralis, kasih mendorong politisi Kristen untuk memprioritaskan dialog antaragama dan kebijakan yang menghormati keberagaman.

PEMBAHASAN

Integritas: Landasan Utama Politik Kristen

Integritas merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan Kristen yang menjadi landasan penting bagi keterlibatan dalam dunia politik. Dalam konteks ini, integritas mencerminkan keselarasan antara iman yang diakui seseorang dengan tindakan yang dilakukannya.¹⁴ Bagi umat Kristen, keterlibatan politik bukan semata-mata tentang memperoleh kekuasaan, tetapi menjadi panggilan untuk melayani masyarakat melalui kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kristiani seperti keadilan, kasih, dan damai sejahtera. Tanpa integritas, keterlibatan politik dapat terjebak dalam pragmatisme yang mengorbankan nilai-nilai moral demi kepentingan

¹² Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249-66.

¹³ Hengki Wijaya, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016). 17

¹⁴ Yonatan Alex Arifianto and Yonathan S. E. Ngesthi, "Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik," *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60-71.

pribadi atau kelompok tertentu. Dalam teologi Kristen, integritas dipahami sebagai kesatuan yang utuh antara hati, pikiran, dan perbuatan yang tunduk pada kehendak Allah.¹⁵ Hal ini mencakup komitmen untuk hidup dalam kebenaran, sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Amsal 11:3 menyatakan, “Orang yang jujur dituntun oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kelicikannya”. Ayat ini menunjukkan bahwa integritas adalah kekuatan moral yang menuntun individu untuk tetap setia pada prinsip kebenaran, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, termasuk dalam arena politik.

Dalam ranah politik, integritas tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.¹⁶ Pemimpin yang berintegritas mampu menghindari godaan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kerap menjadi tantangan dalam dunia politik. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin Kristen dapat memberikan teladan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.¹⁷ Integritas Kristen dalam politik terwujud dalam keselarasan antara pengakuan iman dan tindakan nyata. Yakobus 2:17 menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati.¹⁸ Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa pengakuan akan keimanan kepada Kristus mesti tercermin dalam kebijakan dan perilaku yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai tersebut, tetapi menjalankannya dalam setiap aspek pelayanannya.

Alkitab memberikan banyak contoh pemimpin yang menunjukkan integritas dalam pelayanan politik, seperti Daniel dan Nehemia. Daniel, misalnya, dikenal sebagai seorang pejabat yang tidak berkompromi dengan nilai-nilai moralnya meskipun berada di lingkungan pemerintahan yang korup.¹⁹ Integritasnya terlihat ketika ia tetap setia beribadah kepada Allah meskipun diancam hukuman mati (lht. Daniel 6). Kisah-kisah seperti ini memberikan inspirasi bagi umat Kristen untuk meneladani integritas dalam keterlibatan mereka di dunia politik. Meskipun penting, mempertahankan integritas dalam politik sering kali menghadapi tantangan yang besar. Godaan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip moral, seperti mengejar kekuasaan dengan segala cara, dapat mengaburkan komitmen kepada kebenaran. Selain itu, tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sering kali memaksa individu untuk mengkompromikan nilai-nilai Kristen. Dalam situasi

¹⁵ Made Nopen Supriadi, *Integritas: Sebuah Rekonstruksi Pemahaman Secara Filosofis-Teologis* (Bengkulu: Permata Rafflesia, 2022). 6

¹⁶ Brian W. Head, “The Contribution of Integrity Agencies to Good Governance,” *Policy Studies* 33, no. 1 (2012): 7–20.

¹⁷ Topayung, “Urgensi Kepemimpinan Kristen di Era Society 5.0.”

¹⁸ Esap Veri et al., “Panggilan Orang Percaya di Masa Pandemi Covid-19, untuk Menghidupi Iman dalam Perbuatan Berdasarkan Yakobus 2:17,” *Luxnos* 8, no. 1 (2022): 56–67.

¹⁹ Phanny T. Kakauhe and Fransiskus I. Widjaja, “Karakteristik Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik: Refleksi Daniel 6:4,” *Diegesis* 3, no. 2 (2020): 82–90.

seperti ini, integritas menjadi penentu utama untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip iman.

Pemimpin politik yang berintegritas memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam dunia yang sering kali dilanda ketidakpercayaan terhadap institusi politik, integritas dapat menjadi jembatan untuk membangun kembali kepercayaan tersebut.²⁰ Masyarakat akan cenderung mendukung pemimpin yang menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam politik Kristen, integritas bukan hanya nilai moral, tetapi juga merupakan dasar pelayanan publik.²¹ Politik dilihat sebagai panggilan untuk melayani, bukan sekadar sarana untuk mencapai ambisi pribadi. Sebagai bentuk pelayanan, politik yang berlandaskan integritas bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang adil, mensejahterakan masyarakat, dan menghormati martabat manusia. Pandangan ini selaras dengan ajaran Yesus yang menekankan pentingnya melayani, bukan dilayani (bnd. Mat. 20:28).

Di era pluralisme dan globalisasi, integritas Kristen dalam politik menjadi semakin relevan. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, pemimpin Kristen yang berintegritas dapat menjadi teladan dalam menjembatani perbedaan dan mempromosikan kerukunan.²² Selain itu, integritas juga menjadi fondasi untuk melawan tekanan globalisasi yang sering kali mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Kristen, seperti materialisme dan relativisme moral. Politik yang berlandaskan integritas memiliki potensi besar untuk mentransformasi masyarakat. Ketika pemimpin Kristen yang berintegritas menerapkan nilai-nilai keadilan dan kasih dalam kebijakan publik, hal ini dapat membawa perubahan positif yang berdampak luas. Sebagai garam dan terang dunia (bnd. Mat. 5:13-16), pemimpin Kristen memiliki panggilan untuk membawa pengaruh yang membangun dalam setiap lapisan masyarakat.²³

Integritas adalah nilai yang tak tergantikan dalam keterlibatan politik Kristen. Sebagai landasan utama, integritas memastikan bahwa setiap tindakan politik yang dilakukan berakar pada prinsip-prinsip iman. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, integritas memberikan arah yang jelas untuk tetap setia kepada kebenaran dan kasih. Dengan demikian, umat Kristen dapat menjalankan panggilannya dalam politik sebagai sarana pelayanan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan memuliakan nama Tuhan.

²⁰ N. A. Mozumde, "Can Ethical Political Leadership Restore Public Trust in Political Leaders?," *Public Organization Review* 22 (2022): 821-835.

²¹ Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*.

²² Paulus Eko Kristianto, "Merumuskan Etika Politik Kristen dalam Era Gangguan Terorisme di Indonesia," *Dunamis* 3, no. 2 (2019): 223.

²³ Beriaman Ndruru et al., "Teologi Praktis dalam Gereja untuk Mewujudkan Moderasi Agama Berdasarkan Matius 5:13-16," *Jurnal Christian Humaniora* 7, no. 2 (2023): 01-15.

Kasih sebagai Prinsip Pelayanan Politik

Kasih merupakan inti dari ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sebagaimana tercantum dalam Injil Yohanes 13:34-35, di mana Yesus memerintahkan para pengikut-Nya untuk saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka.²⁴ Dalam konteks politik, kasih ini menjadi prinsip yang menuntun umat Kristen untuk terlibat secara aktif dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat luas. Kasih dalam politik tidak sekadar berbentuk empati, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam ranah politik, kasih diterjemahkan sebagai kepedulian terhadap keadilan sosial. Keadilan sosial mengacu pada distribusi yang adil atas sumber daya, hak, dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁵ Prinsip kasih menuntut politisi Kristen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau yang berkuasa, tetapi memperhatikan kebutuhan kelompok marginal, seperti masyarakat miskin, kaum difabel, dan minoritas. Melalui keadilan sosial, kasih melampaui sekadar perasaan dan menjadi aksi nyata yang mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain keadilan sosial, kasih dalam politik terwujud dalam komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi mencakup pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang bermartabat.²⁶ Kebijakan politik yang lahir dari prinsip kasih akan berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan jaminan kesehatan yang inklusif. Dengan demikian, politisi Kristen yang melayani dengan kasih menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Elemen kasih dalam politik tercermin dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Kelompok rentan sering kali menjadi korban ketidakadilan struktural yang membuat mereka sulit memperjuangkan haknya.²⁷ Politisi yang didorong oleh kasih akan menggunakan posisinya untuk membela hak-hak kelompok ini, menciptakan kebijakan yang melindungi mereka dari eksploitasi, dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan panggilan Kristen untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara (Amsal 31:8-9).

Secara teologis, kasih dalam pelayanan politik berakar pada konsep Kerajaan Allah, yang menekankan keadilan, damai sejahtera, dan kebenaran sebagai nilai-nilai utama. Dalam politik, kasih menjadi kekuatan transformasi yang melawan praktik

²⁴ Michael H. Crosby, *Apakah Engkau Mengasihi Aku?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009). 266

²⁵ Josapat Bangun, "Penerapan Nilai-nilai Karakter Kristiani dalam Aktivitas Kepemimpinan Kristen," *Harvester* 7, no. 1 (2022): 15-31.

²⁶ Maija Lanas and Michalinos Zembylas, "Towards a Transformational Political Concept of Love in Critical Education," *Studies in Philosophy and Education* 34 (2015): 31-44.

²⁷ Septian Tri Cahyono, "Gereja dan Mandat Sosial Politik," *Khatulistiwa* 1, no. 1 (2023): 65-77.

korupsi, diskriminasi, dan eksploitasi. Prinsip kasih ini tidak hanya bersifat idealis, tetapi juga aplikatif, dengan mendasari setiap keputusan politik pada kebenaran dan keadilan yang bersumber dari iman Kristen. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme, kasih menjadi pilar penting dalam mengelola keberagaman.²⁸ Kasih dalam politik memungkinkan seorang pemimpin untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dalam masyarakat yang heterogen, politisi Kristen yang melayani dengan kasih akan berupaya menciptakan kebijakan yang inklusif, yang menghormati hak semua individu tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau suku. Kasih menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dalam harmoni.

Implementasi kasih dalam politik membutuhkan integritas pribadi yang kuat. Tanpa integritas, kasih dapat kehilangan maknanya dan menjadi alat manipulasi. Sehingga, politisi Kristen sebaiknya menjaga konsistensi antara nilai kasih yang mereka yakini dengan tindakan nyata dalam kehidupan politik. Integritas ini mencerminkan keselarasan antara iman dan praktik politik, sehingga pelayanan politik menjadi kesaksian yang nyata tentang nilai-nilai Kristen.²⁹ Kasih dalam pelayanan politik tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi pada perubahan paradigma dalam dunia politik itu sendiri. Ketika politisi Kristen melayani dengan kasih, mereka menunjukkan bahwa politik bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan, tetapi sarana untuk melayani dan memuliakan Allah. Paradigma ini berpotensi menginspirasi generasi baru pemimpin yang melihat politik sebagai panggilan suci untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Tantangan dalam menerapkan kasih dalam politik tidaklah ringan. Korupsi, kompromi moral, dan tekanan dari berbagai pihak sering kali menjadi hambatan.³⁰ Namun, kasih memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kasih yang sejati tidak menghindari tantangan, tetapi menghadapinya dengan keyakinan bahwa nilai-nilai Kristen memiliki kekuatan untuk mengubah dunia politik yang sering kali dianggap penuh intrik. Dengan demikian, kasih sebagai prinsip pelayanan politik tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan inklusif. Melalui penerapan kasih, politisi Kristen dapat menjadi alat Allah dalam mewujudkan kehendak-Nya di tengah dunia yang membutuhkan transformasi.³¹ Prinsip ini menegaskan bahwa politik, ketika dijalankan dengan kasih dan integritas,

²⁸ Rezeki Putra Gulo et al., "Membentuk Identitas Kristen yang Toleran : Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Pilar Kebhinekaan," *Jurnal Teologi Amreta* 8, no. 2 (2024): 1-27.

²⁹ I Lintarwati et al., "Kerukunan di Ruang Publik Digital dalam Bingkai Iman Kristen: Upaya Mereduksi Politik Identitas," *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 1 (2022): 79-88.

³⁰ Zega and Silaen, "Pembimbingan Jemaat di GKSI Isa Almasih Taman Mini dalam Menolak Politik Uang."

³¹ Yonathan S. E. Ngesthi, Yonatan A. Arifianto, and Nining Indriana, "Membumikan Nilai dan Etika Politik Kristen dalam Teologi Titus 3:1-7 bagi Politikus Kristen Masa Kini," *Immanuel* 5, no. 2 (2024): 156-74.

dapat menjadi ladang pelayanan yang memuliakan Allah dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Teologi Politik: Keadilan dan Kebenaran

Teologi politik merupakan cabang teologi yang mempelajari hubungan antara iman Kristen dan realitas politik dalam kerangka pengelolaan kehidupan bersama. Dalam perspektif Kristen, politik tidak hanya dimaknai sebagai seni meraih kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah masyarakat.³² Prinsip ini mendasari pentingnya keadilan dan kebenaran sebagai inti dari teologi politik. Keadilan mengacu pada distribusi yang merata dari hak dan kewajiban, sedangkan kebenaran melibatkan keselarasan antara tindakan manusia dan kehendak Allah. Dengan demikian, teologi politik menjadi alat yang relevan untuk memahami panggilan Kristen dalam mengintegrasikan iman ke dalam arena politik guna menciptakan transformasi sosial.

Mandat budaya yang tercantum dalam Kejadian 1:28 memberikan kerangka awal untuk memahami tanggung jawab manusia dalam mengelola bumi.³³ Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi, menaklukkannya, dan berkuasa atas ciptaan lainnya. Mandat ini menunjukkan bahwa keterlibatan manusia dalam politik merupakan bagian dari panggilan ilahi untuk mengelola dunia dengan keadilan dan hikmat. Dalam konteks politik, mandat ini bukanlah sekadar wewenang untuk memerintah, tetapi kewajiban untuk memelihara tatanan sosial yang mencerminkan keadilan Allah. Sehingga, mandat budaya menjadi landasan teologis bagi umat Kristen untuk terlibat aktif dalam politik sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap penciptaan.

Peran nabi-nabi dalam Alkitab memberikan contoh konkret bagaimana prinsip keadilan dan kebenaran diterapkan dalam konteks sosial-politik. Nabi Amos, misalnya, menyerukan keadilan bagi kaum tertindas dan menentang praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat miskin (lht. Am. 5:24).³⁴ Nabi Mikha juga menekankan pentingnya keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Allah (bnd. Mik. 6:8).³⁵ Kedua nabi ini, bersama dengan nabi-nabi lainnya, memberikan pelajaran penting bahwa keadilan adalah inti dari kehendak Allah bagi masyarakat. Dalam konteks politik modern, peran nabi-nabi ini mengilhami umat Kristen untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Yesus Kristus memberikan teladan unik dalam memandang politik sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam pengajarannya, Yesus

³² Michael Novak, *Teologi Politik Radikal* (Depok: Jalan Baru Publisher, 2018). 129

³³ Hanny Frederik and Randy F. Rouw, "Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai Pengejawantahan Mandat Budaya Kejadian 1:28 dalam Gereja Lokal," *Jireh* 4, no. 2 (2023): 444–61.

³⁴ Michael Ufok Udoekpo, *Rethinking the Prophetic Critique of Worship in Amos 5 for Contemporary Nigeria and the USA* (Eugene: Pickwick Publications, 2017). 134

³⁵ W.S Lasor et al., *Pengantar Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997). 228

sering berbicara tentang Kerajaan Allah yang mencakup keadilan, kasih, dan damai sejahtera.³⁶ Ketika menghadapi pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar, Yesus menunjukkan bahwa penghormatan kepada otoritas duniawi dapat berjalan selaras dengan kesetiaan kepada Allah (bnd. Mat. 22:21). Hal ini menunjukkan bahwa politik, jika dilakukan dengan prinsip yang benar, dapat menjadi alat untuk mewujudkan visi Allah atas dunia. Kerajaan Allah menjadi paradigma teologis yang menuntun umat Kristen dalam menentukan sikap dan tindakan politik mereka.

Keadilan dalam teologi politik Kristen tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi keberpihakan kepada kelompok marginal dan tertindas.³⁷ Prinsip ini ditemukan dalam berbagai bagian Alkitab yang menyerukan perlindungan terhadap janda, anak yatim, dan orang asing (bnd. Maz. 82:3-4). Dalam dunia politik, keadilan menjadi prinsip etis yang harus diimplementasikan melalui kebijakan publik yang memperhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.³⁸ Dengan demikian, politik yang berorientasi pada keadilan tidak hanya berbicara tentang distribusi kekuasaan, tetapi transformasi struktur sosial yang mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kebenaran dalam politik Kristen mengacu pada integritas dan keselarasan antara iman dan tindakan. Dalam Yohanes 14:6, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah kebenaran,³⁹ yang berarti bahwa setiap tindakan politik Kristen sebaiknya mencerminkan nilai-nilai Kristus. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi prinsip yang mengarahkan politisi Kristen untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada Alkitab. Kebijakan publik yang benar adalah kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi yang membawa kebaikan bagi semua.

Melalui mandat budaya, umat Kristen dipanggil untuk mengelola dunia dengan hikmat Allah, dan politik merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan panggilan ini. Ketika umat Kristen terlibat dalam politik, mereka tidak hanya memegang posisi sebagai pemimpin, tetapi sebagai pelayan yang bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Politik yang dilaksanakan dengan semangat pelayanan akan menghasilkan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, damai sejahtera, dan kasih. Di era pluralisme dan globalisasi, politik Kristen menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk konflik nilai dan kepentingan.⁴⁰ Umat Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dalam konteks ini, dengan menampilkan integritas dan kasih sebagai prinsip utama. Dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran,

³⁶ Marthin S. Lumingkewas et al., "The Meaning of Jesus' Identity and Mission in Mark 8:31-38: A Reflection for God's People," *Millah* 21, no. 1 (2021): 253-74.

³⁷ Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. 212

³⁸ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). 125

³⁹ Yeremia Hia and Turutiamin Sarumaha, "Makna Ungkapan Ego Emi dalam Yohanes 11:25 dan 14:6," *Phronesis* 3, no. 1 (2020): 61-68.

⁴⁰ Ngesthi, "Membumikan Nilai dan Etika Politik Kristen dalam Teologi Titus 3:1-7 bagi Politik Kristen Masa Kini," 2024.

politik Kristen dapat menjembatani perbedaan dan menciptakan solusi yang inklusif bagi masyarakat majemuk. Pendekatan ini sejalan dengan mandat budaya untuk memelihara harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Teologi politik Kristen tidak hanya relevan dalam konteks Alkitab, tetapi juga dalam situasi kontemporer. Prinsip-prinsip seperti keadilan dan kebenaran dapat diterapkan melalui advokasi, partisipasi dalam proses legislatif, dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada masyarakat marginal. Umat Kristen yang terlibat dalam politik memiliki tanggung jawab untuk membawa perspektif Kerajaan Allah dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan nilai-nilai Kristen. Teologi politik yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran memberikan dasar teologis bagi umat Kristen untuk terlibat aktif dalam politik sebagai bentuk pelayanan.⁴¹ Mandat budaya dan peran nabi-nabi dalam Alkitab menegaskan pentingnya politik sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak Allah. Dengan prinsip keadilan dan kebenaran, umat Kristen dapat menciptakan transformasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah, menjadikan politik bukan sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai pelayanan yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua.

Pendekatan Holistik dan Aplikatif terhadap Politik Kristen

Pendekatan holistik dan aplikatif dalam politik Kristen merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan refleksi teologis dengan langkah-langkah praktis untuk menjawab tantangan politik kontemporer. Dalam konteks pluralisme dan globalisasi, politik tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas sosial, budaya, dan ideologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga, umat Kristen perlu melihat politik sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah, yaitu keadilan, kasih, dan damai sejahtera.⁴² Pendekatan holistik menuntut pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip teologis, sementara pendekatan aplikatif memastikan bahwa prinsip tersebut diwujudkan dalam tindakan konkret yang relevan dengan situasi zaman. Refleksi teologis menjadi landasan utama dalam pendekatan ini karena politik, dalam perspektif Kristen, mesti diarahkan oleh nilai-nilai yang bersumber dari firman Allah. Alkitab memberikan pedoman etis dan teologis bagi umat Kristen untuk berperan aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang adil.⁴³ Sebagai contoh, mandat budaya dalam Kejadian 1:28 menggarisbawahi tanggung jawab manusia untuk memelihara dan mengelola dunia dengan hikmat dan keadilan. Pendekatan ini juga terinspirasi dari teladan nabi-nabi Perjanjian Lama dan

⁴¹ David VanDrunen, *Politics After Christendom: Political Theology in a Fractured World* (Machigan: Zondervan Academic, 2020). 37

⁴² Susanta, "Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta."

⁴³ Fingfing K. G. Wong and Styadi Senjaya, "Prinsip-Prinsip Etika Kristen dan Implementasinya bagi Transformasi Kebijakan dan Pelayanan Publik di Indonesia," *Tumou Tou* 11, no. 2 (2024): 68–81.

pengajaran Yesus Kristus tentang hubungan antara iman dan otoritas duniawi. Dengan demikian, refleksi teologis menyediakan kerangka moral dan spiritual untuk menavigasi kompleksitas dunia politik.

Namun, refleksi teologis saja tidak cukup untuk menjawab tantangan politik kontemporer. Pendekatan aplikatif diperlukan agar prinsip-prinsip teologis dapat diterapkan secara nyata di tengah konteks pluralisme dan globalisasi. Pluralisme agama, misalnya, menuntut sikap inklusif yang tetap teguh pada kebenaran iman Kristen tetapi juga menghormati keberagaman.⁴⁴ Globalisasi, di sisi lain, memunculkan isu-isu lintas negara, seperti ketidakadilan ekonomi dan perubahan iklim, yang memerlukan respons lintas budaya dan lintas agama. Pendekatan aplikatif mengarahkan umat Kristen untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan universal dan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Konteks pluralisme memberikan tantangan tersendiri bagi politik Kristen, karena perbedaan nilai dan keyakinan sering kali memicu konflik.⁴⁵ Dalam pendekatan holistik, umat Kristen diajak untuk memahami pluralisme sebagai peluang untuk menyatakan kasih Allah dalam tindakan nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan dialog antaragama dan kerja sama lintas iman dalam mengatasi masalah sosial. Kasih, sebagai prinsip universal yang diajarkan dalam 1 Korintus 13:4-7, menjadi fondasi etis bagi keterlibatan Kristen dalam politik pluralis. Kasih tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang melindungi hak-hak semua kelompok, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan.

Globalisasi membawa tantangan baru berupa persaingan global, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya asing yang dapat mengancam identitas lokal.⁴⁶ Pendekatan holistik dan aplikatif memandang globalisasi sebagai kesempatan untuk mengedepankan nilai-nilai Kristen yang transformatif. Umat Kristen dapat memainkan peran sebagai agen transformasi melalui kebijakan yang mendukung perdagangan adil, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Langkah-langkah ini mencerminkan keadilan Kerajaan Allah dalam konteks global yang kompleks. Pendekatan holistik dan aplikatif terhadap politik Kristen memberikan kerangka kerja yang tidak hanya reflektif tetapi praktis dalam menghadapi tantangan pluralisme dan globalisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis ke dalam langkah-langkah konkret, umat Kristen dapat menjadi agen transformasi sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya relevan tetapi memberikan panduan praktis untuk menjalankan panggilan Kristen dalam politik dengan integritas dan kasih.

⁴⁴ Gulo, Mbelanggedo, and Padakari, "Membentuk Identitas Kristen yang Toleran : Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Pilar Kebhinekaan."

⁴⁵ Yonatan A. Arifianto et al., "Sosiologi Pluralisme dalam PAK: Upaya Membangun Kesatuan Bangsa," *Shanan* 5, no. 2 (2021): 95-110.

⁴⁶ Steve Melliush, "Globalization, Culture and Psychology," *International Review of Psychiatry* 26, no. 5 (2014): 538-543.

KESIMPULAN

Keterlibatan umat Kristen dalam politik adalah sebuah panggilan mulia yang berlandaskan nilai-nilai integritas dan kasih. Politik, yang sering kali dipenuhi intrik dan kepentingan pribadi, dapat menjadi alat transformasi sosial ketika dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Dengan berpegang pada integritas, seorang politisi Kristen mampu menunjukkan konsistensi antara pengakuan iman dan tindakan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kasih sebagai inti dari pelayanan politik diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memprioritaskan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan perlindungan kelompok marginal. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah dinamika politik kontemporer. Refleksi teologis menjadi panduan etis untuk menavigasi kompleksitas politik, sementara langkah-langkah praktis memastikan bahwa nilai-nilai Kristen dapat diterapkan secara relevan dalam konteks masyarakat modern. Dalam menghadapi isu-isu global seperti ketidakadilan ekonomi dan perubahan iklim, politik Kristen dituntut untuk mengedepankan solusi yang inklusif dan transformatif. Dengan mengintegrasikan prinsip kasih dan keadilan dalam setiap keputusan politik, umat Kristen tidak hanya memenuhi panggilan untuk melayani, tetapi juga menjadi saksi nyata tentang kasih Allah yang mengubah dunia.

REKOMENDASI PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Kristen, seperti integritas dan kasih, dalam praktik politik pada tingkat lokal maupun nasional, khususnya dalam konteks masyarakat pluralistik di Indonesia. Penelitian dapat difokuskan pada studi kasus politisi Kristen yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga dapat memberikan model praktik terbaik bagi generasi pemimpin berikutnya. Selain itu, kajian interdisipliner yang mengintegrasikan teologi, sosiologi, dan ilmu politik diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip teologis dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan publik yang berkeadilan dan inklusif.

REFERENSI

- Arifianto, Yonatan Alex, Andreas Fernando, and Reni Triposa. "Sosiologi Pluralisme Dalam Pendidikan Agama Kristen: Upaya Membangun Kesatuan Bangsa." *Jurnal Shanan* 5, no. 2 (2021): 95-110.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi. "Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral Dan Integritas Umat Dalam Menghadapi Tahun Politik." *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60-71.
- Bangun, Josapat. "Penerapan Nilai-Nilai Karakter Kristiani Dalam Aktivitas Kepemimpinan Kristen." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 7, no. 1 (2022): 15-31.
- Borrong, Robert P. *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi & Pusat Studi Etika, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta,

- 2006.
- Cahyono, Septian Tri. "Gereja Dan Mandat Sosial Politik." *KHATULISTIWA* 1, no. 1 (2023): 65–77.
- Crosby, Michael H. *Apakah Engkau Mengasihi Aku?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Frederik, Hanny, and Randy Frank Rouw. "Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Pengejawantahan Mandat Budaya Kejadian 1:28 Dalam Gereja Lokal." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 2 (2023): 444–461.
- Gulo, Rezeki Putra, Nelci Mbelanggedo, and Seprianus L Padakari. "Membentuk Identitas Kristen Yang Toleran : Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan." *Jurnal Teologi Amreta* 8, no. 2 (2024): 1–27.
- Head, Brian W. "The Contribution of Integrity Agencies to Good Governance." *Policy Studies* 33, no. 1 (2012): 7–20.
- Hia, Yeremia, and Turutiamin Sarumaha. "Makna Ungkapan Ego Emi Dalam Yohanes 11:25 Dan 14:6." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 3, no. 1 (2020): 61–68.
- Indratno, Yohanes T. Agus, Riyanti, and Simon. "Berpolitik: Pandangan Alkitab Tentang Politik Dan Bagaimana Orang Kristen Bersikap Terhadap Politik." *Lampo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2024): 16–25.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 5–17.
- Kakauhe, Phanny Tandy, and Fransiskus Irwan Widjaja. "Karakteristik Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik: Refleksi Daniel 6:4." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 3, no. 2 (2020): 82–90.
- Kristianto, Paulus Eko. "Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 223.
- Lanas, Maija, and Michalinos Zembylas. "Towards a Transformational Political Concept of Love in Critical Education." *Studies in Philosophy and Education* 34 (2015): 31–44.
- Lasor, W.S, D.A Hubbard, and F.W Bush. *Pengantar Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Lintarwati, I, Y A Arifianto, and Simon. "Kerukunan Di Ruang Publik Digital Dalam Bingkai Iman Kristen: Upaya Mereduksi Politik Identitas." *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 1 (2022): 79–88.
- Lumingkewas, Marthin Steven, Bobby Kurnia Putrawan, and Susanti Embong Bulan. "The Meaning of Jesus' Identity and Mission in Mark 8:31-38: A Reflection for God's People." *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 1 (2021): 253–274.
- Melluish, Steve. "Globalization, Culture and Psychology." *International Review of Psychiatry* 26, no. 5 (2014): 538–543.
- Mozumde, N. A. "Can Ethical Political Leadership Restore Public Trust in Political Leaders?" *Public Organization Review* 22 (2022): 821–835.
- Nainggolan, Denni Khas Juliana Br, Regita Depari, Mida Tambunan, and Uli Anggraeni Sembiring. "Kreativitas Guru PAK Mengajak Siswa Hidup Dalam Kasih Menurut 1 Korintus 13:4-7." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2022): 20–36.

- Ndruru, Beriaman, Dyulius Thomas Bilo, and Yeremia Hia. "Teologi Praktis Dalam Gereja Untuk Mewujudkan Moderasi Agama Berdasarkan Matius 5:13-16." *Jurnal Christian Humaniora* 7, no. 2 (2023): 01-15.
- Ngesthi, Jonathan Salmon Efrayim, Yonatan Alex Arifianto, and Nining Indriana. "Membumikan Nilai Dan Etika Politik Kristen Dalam Teologi Titus 3:1-7 Bagi Politikus Kristen Masa Kini." *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 156-174.
- Ngesthi, Yonathan Salmon Efrayim, Yonatan Alex Arifianto, and Nining Indriana. "Membumikan Nilai Dan Etika Politik Kristen Dalam Teologi Titus 3:1-7 Bagi Politikus Kristen Masa Kini." *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 156-174.
- Novak, Michael. *Teologi Politik Radikal*. Depok: Jalan Baru Publisher, 2018.
- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 58-73.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Supriadi, Made Nopen. *Integritas: Sebuah Rekonstruksi Pemahaman Secara Filosofis - Teologis*. Bengkulu: PERMATA RAFFLESIA, 2022.
- Suryowati. *Agresivitas Pajak Dan Alternatifnya: Dari Sudut Pandang Matius 22:15-22*. Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22-36.
- Topayung, Samuel Linggi. "Urgensi Kepemimpinan Kristen Di Era Society 5.0." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 3, no. 2 (2023): 111-124.
- Udoekpo, Michael Ufok. *Rethinking the Prophetic Critique of Worship in Amos 5 for Contemporary Nigeria and the USA*. Eugene: Pickwick Publications, 2017.
- VanDrunen, David. *Politics After Christendom: Political Theology in a Fractured World*. Michigan: Zondervan Academic, 2020.
- Veri, Esap, Oktofianus Taebenu, Gunar Sahar, and Sri Dwi Harti. "Panggilan Orang Percaya Di Masa Pandemi Covid-19, Untuk Menghidupi Iman Dalam Perbuatan Berdasarkan Yakobus 2:17." *Jurnal Luxnos* 8, no. 1 (2022): 56-67.
- Wijaya, Hengki. *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016.
- Wong, Fingfing K. Grace, and Styadi Senjaya. "Prinsip-Prinsip Etika Kristen Dan Implementasinya Bagi Transformasi Kebijakan Dan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Tumou Tou* 11, no. 2 (2024): 68-81.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249-266.
- Zega, Yanuar Ada, and Riste Tioma Silaen. "Pembimbingan Jemaat Di GKSI Isa Almasih Taman Mini Dalam Menolak Politik Uang." *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 70-85.